

JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : **FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Kode>Nama MK : **SOSI4404.12/Sosiologi Distribusi 12**
Tugas : **1**

Pertanyaan 1/3:

Dalam modul 1 Pokok Bahasan 1 Sub Pokok Bahasan 1, telah dijelaskan mengenai sumbangan pemikiran tokoh sosiologi terhadap stratifikasi. Munculnya stratifikasi sosial sebagai motivasi bagi lapisan bawah untuk ikut berpartisipasi sehingga dapat mencapai lapisan yang lebih tinggi. Jelaskan perbedaan pemikiran Parson dan Karl Marx dalam melihat stratifikasi sosial.

Jawaban 1/3:

Sosiolog Amerika Serikat **Talcott Parsons** [1902-1979] (Ref. [2(a)]) hidup satu generasi setelah **Karl Marx** [1818-1883] (Ref. [2(c)]), filsuf kelahiran Jerman yang melahirkan gagasan-gagasannya setelah mengalami berbagai dampak sosial-ekonomi dari revolusi industri di Inggris. **Marx** mengembangkan perspektif sosiologi yang berbasis teori konflik, yang berlawanan dengan perspektif struktural-fungsionalisme yang dianut **Parsons**. Dalam pandangan struktural-fungsionalisme, masyarakat selalu dalam keadaan stabil, teratur dan saling bekerja-sama, sehingga stratifikasi sosial diperlukan agar struktur masyarakat dapat bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Sebaliknya, dalam pandangan teori konflik, masyarakat selalu berada dalam situasi konflik antar-kelas, sebagai dampak dari eksploitasi kelas bawah oleh kelas di atasnya, dan perebutan kekuasaan.

Dalam pandangan penganut struktural-fungsionalisme, stratifikasi sosial terjadi karena sistem *merit*, sehingga yang paling ber-prestasi dan paling ber-bakat sudah semestinya menduduki stratifikasi yang lebih tinggi karena harus berperan lebih penting (menjadi pemimpin, pengurus, pejabat tinggi, dan seterusnya), sehingga stratifikasi sosial menjadi sumber motivasi untuk mobilitas vertikal (Ref. [1], [2(b)]), sedangkan yang kurang kompeten memang seharusnya berada di strata sosial yang lebih rendah. Sementara itu, penganut teori konflik memandang stratifikasi sosial terjadi karena kepemilikan dan penguasaan modal oleh kelas masyarakat yang lebih tinggi (kaum majikan, borjuis), yang digunakan untuk meng-eksploitasi kelas di bawahnya (kaum buruh, proletar) dalam suatu dominasi kelas.

Mobilitas vertikal menurut penganut struktural-fungsionalisme dapat terjadi dengan berlakunya meritokrasi, sehingga setiap individual dalam masyarakat itu mendapat kesempatan yang sama untuk menaiki jenjang ke strata yang lebih tinggi semata-mata sebagai penghargaan atas prestasinya (Ref. [1], [2(b)]). Bagi penganut teori konflik, sistem kapitalisme menjadi kendala bagi mereka yang berada di kelas bawah untuk naik kelas, sehingga mobilitas vertikal hanya

dimungkinkan jika konflik sudah memuncak menjadi revolusi, ketika kaum proletar merebut sarana produksi dari kaum borjuis. Fenomena sistem transportasi *on-line* yang ada pada era digital ini, ternyata tidak sesuai dengan harapan penganut teori konflik. Alat-alat produksi seperti kendaraan roda-dua dan roda-empat sudah dimiliki dan dikuasai oleh para pengemudi, tapi nyatanya mereka tidak naik kelas menjadi majikan, tetap saja dalam status sebagai kelas yang di-eksploitasi sebagai buruh, oleh pemilik aplikasi, yang sebenarnya tidak memiliki dan tidak menguasai alat produksi apa pun.

Lembaga-lembaga struktural dalam masyarakat, bagi penganut paham struktural-fungsionalisme seperti **Parsons**, berfungsi menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat yang stabil, sedangkan bagi penganut teori konflik seperti **Marx**, lembaga-lembaga tersebut mempertahankan *status-quo*, menjaga agar kelas borjuis tetap mendominasi kelas proletar, seringkali dengan menggunakan jargon-jargon dan mitos.

Pertanyaan 2/3:

Jelaskan hubungan kepentingan individu dan Masyarakat

Jawaban 2/3:

Hubungan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat merupakan topik yang hangat diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para ilmuwan sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Setidaknya ada tiga perspektif yang berbeda, yaitu perspektif struktural-fungsionalisme seperti yang digagas **Talcott Parsons**, (Ref. [1], [2(a)]), perspektif teori konflik seperti dari **Karl Marx**, (Ref. [1], [2(c)], [2(d)]) dan perspektif interaksionisme-simbolik seperti yang diusulkan oleh **Erving Goffman** (Ref. [2(e)], [2(f)]) dan **George Herbert Mead** (Ref. [2(g)]).

Dari pandangan penganut struktural-fungsionalisme, kepentingan individu selalu dijaga agar selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat. Ambisi, aspirasi dan keinginan individu disalurkan melalui mekanisme insentif dan pembagian kerja untuk mencapai keteraturan dalam masyarakat. Dengan demikian, stratifikasi sosial merupakan alokasi peran dari masing-masing individu dalam masyarakat, demi terpenuhinya kepentingan individu maupun masyarakatnya. Kepentingan masyarakat adalah kumpulan atau kombinasi dari berbagai kepentingan individu warga masyarakat tersebut.

Para penganut teori konflik, berlawanan dengan perspektif struktural-fungsionalisme, memandang antara kepentingan individu selalu bersitegang dengan kepentingan masyarakat yang umumnya didominasi oleh kepentingan *elite* kaum borjuis dengan mekanisme eksploitasi menggunakan kekuasaan. Individu-individu dalam masyarakat selalu harus memperjuangkan

kepentingannya menghadapi kepentingan “masyarakat” (dalam tanda kutip) yang sebenarnya merepresentasikan kepentingan *elite*.

Perspektif interaksionisme-simbolik mengajukan gagasan yang berbeda dengan pandangan penganut struktural-fungsionalisme dan penganut teori konflik. Dalam pandangan ini, akan selalu ada negosiasi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sehingga kepentingan masyarakat dibentuk oleh kepentingan individu-individu warga masyarakat, dan sebaliknya, kepentingan masyarakat juga membentuk kepentingan individu-individu di dalamnya, melalui mekanisme pemaknaan dan penafsiran dari peran-peran sosial individu.

Pertanyaan 3/3:

Jelaskan perbedaan pola-pola distribusi Masyarakat Meramu, Pertanian dan Industri..

Jawaban 3/3:

Perkembangan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pada umumnya terbagi menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu: (1) masyarakat pemburu dan pengepul, (2) masyarakat hortikultural, (3) masyarakat pertanian, (4) masyarakat industrial, dan (5) masyarakat pasca-industrial (Ref. [2(i)], [2(j)]). Masyarakat “meramu” merupakan salah satu perkembangan masyarakat pra-agrikultural (Ref. [1]), yang dicirikan dengan kuatnya tradisi spiritual, ritualistik dan perdukunan, yang banyak menggunakan ramuan herbal tradisional. Contohnya seperti masyarakat suku-suku terasing, masyarakat Badui Dalam di Provinsi Banten, masyarakat Daya di Kalimantan, masyarakat Tengger di sekitar gunung Bromo dan Semeru di Jawa Timur, suku Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Pola distribusi pada masyarakat meramu ini merupakan gabungan dari pola distribusi pada masyarakat pemburu-pengepul dengan pola distribusi pada masyarakat hortikultural. Komoditas berupa kebutuhan sehari-hari, khususnya makanan, didistribusikan dengan barter dan berbagi, atau jika dalam masyarakat tersebut sudah ada tokoh yang dihormati, seperti kepala kampung, tetua adat, atau dukun, maka komoditas bisa dikumpulkan pada tokoh tersebut untuk kemudian di-re-distribusikan kembali kepada warga yang membutuhkan. Masyarakat meramu umumnya masih egaliter, belum terjadi perbedaan yang menyolok antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan di atas atau di bawahnya, sehingga belum terlalu terasa adanya stratifikasi sosial. Pola distribusi masih sangat sederhana, bersifat langsung tanpa perantara alat pembayaran seperti uang, dan masih bersifat lokal, belum ada pola distribusi ke daerah-daerah lain.

Pada masyarakat pertanian yang sudah lebih kompleks daripada masyarakat meramu, misalnya pada masyarakat feodal di Eropa yang kemudian dibawa ke daerah-daerah jajahannya, termasuk Indonesia, peranan alat pembayaran khususnya uang menjadi amat penting. Juga mulai dikenal konsep kepemilikan lahan. Yang semula pada perkembangan masyarakat sebelumnya, lahan

sepenuhnya dimiliki oleh warga masyarakat yang tinggal di situ danenggarapnya, berubah menjadi milik tuan-tanah, atau milik penguasa atas nama negara, atau bahkan atas nama Tuhan. Dalam sistem kolonial, lahan dikuasai dan dimiliki oleh bangsa penjajah. Bangsa jajahan hanya menumpang hidup dan dipekerjakan. Dari sini muncul sistem upeti dan pajak, Bukan hanya lahan, tapi semua komoditas yang dihasilkan dari lahan itu pun bukan lagi milik warga masyarakat. Terjadilah kesenjangan di antara strata sosial yang di atas dengan yang di bawah. Ada pola distribusi yang disebut “bagi hasil”, yang sering justru menimbulkan rasa ke-tidak-adil-an.

Masyarakat industrial memperkenalkan sistem pasar dan sistem upah untuk pekerja. Pola distribusi komoditas disalurkan melalui pasar, dengan menggunakan alat pembayaran uang. Sistem upah juga menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Sebagaimana sistem bagi-hasil pada masyarakat pertanian, sistem upah pada masyarakat industri juga sering menimbulkan rasa ke-tidak-adil-an. Jika pada masyarakat pertanian, kepemilikan dan penguasaan lahan menentukan stratifikasi sosial, maka pada masyarakat industri yang menentukan stratifikasi sosial adalah kepemilikan dan penguasaan alat-produksi serta modal. Berakar dari kolonialisme pada masyarakat pertanian, selanjutnya berkembanglah sistem kapitalisme pada masyarakat industri. Kemudian dari itu, terbentuklah masyarakat pasca-industrial, yang berbasis ekonomi digital, yang membangkitkan kapitalisme digital, melalui pasar global yang terbentuk dengan mekanisme globalisasi (Ref. [2(k)]). Stratifikasi sosial sudah mulai terjadi pada skala global, dengan terbentuknya negara-negara maju, menguasai dan meng-eksploitasi sumber daya dari negara-negara yang sedang berkembang, bahkan terbelakang.

REFERENSI

- [1] **Kartono, Drajat Tri**, “*Sosiologi Distribusi*”, **Modul 1 – 9 SOSI4404**, Edisi 4 Cetakan Ketiga [Agustus 2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **Google Search**, Dari Aplikasi Penelusuran, <https://www.google.com/>, diperoleh referensi rujukan sebagai berikut:
 - (a) **Parsons, Talcott**, [1951], “*The Social System*”.
 - (b) **Davis, Kingsley and Wilbert Moore**, [1945], “*Some Principles of Stratification*”.
 - (c) **Marx, Karl**, [1867], “*Das Kapital*”.
 - (d) **Wright, Erik Olin**, [1997], “*Class counts*”.
 - (e) **Bourdieu, Pierre**, [1990], “*The Logic of Practice*”.
 - (f) **Goffman, Erving**, [1956], “*The Presentation of Self in Everyday Life*”.
 - (g) **Bauman, Zygmunt**, [2001], “*Individualized Society*”.
 - (h) **Polanyi, Karl**, [1944], “*The Great Transformation*”.
 - (i) **Sahlins, Marshall**, [1972], “*The Stoneage Economics*”.
 - (j) **Woodburn, James**, [1982], “*Egalitarian Society*”.
 - (k) **Castells, Manuel**, [2013], “*The Rise of the Network Society*”.